

PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN

Tadjudin

STAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
tadjudin.p3m@gmail.com

ABSTRACT

Among the functions of management, the function of control is very important. At this point, a manager should make an evaluation if the set up goal has been reached or not. If not yet, a manager should lead the people to make a reflection about the possible reasons for why the goal is not reached yet.

Kata Kunci: pengawasan, manajemen pendidikan

Pendahuluan

Membangun peradaban bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, dan fisik yang dilandasi oleh fitrah kemanusiaan. Fitrah adalah titik tolak kemuliaan manusia, baik sebagai bawaan seseorang sejak lahir atau sebagai hasil proses pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa, sehingga UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara¹.

Pendidikan adalah salah satu unsur paling penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan proses bimbingan (pimpinan, tuntunan, usulan) oleh subyek didik terhadap perkembangan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan, intuisi) dan raga obyek didik dengan bahan-bahan materi tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi dengan karakter manusia². Kemudian, pada satu fokus yang lebih khusus yaitu pendidikan formal, manusia diberikan dasar-dasar pengetahuan sebagai pegangan dalam menjalani hidup dan menghadapi kenyataan hidup dimana didalam pendidikan formal dalam hal ini adalah sekolah menjadi suatu jenjang yang mungkin memang sudah selayaknya dilalui dalam proses kehidupan manusia. Kemudian dalam pendidikan sekolah itu,

¹ Lihat Tujuan pendidikan Nasional sebagaimana termaktub dalam Bab II Pasal 3 *Undang – Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung : Citra Umbara, 2003), hal. 7

² Endang Saifuddin Anshari, *Pokok-pokok Pikiran tentang Islam*, (Jakarta : Usaha Interprises, 1976), hal. 85

manusia juga selain melatih kedewasaan juga mengasah intelektualitasnya dan kompetensinya dengan tanggung jawab dan kesadaran.

Dalam lembaga pendidikan, manusia dilatih intelektualitasnya dengan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang diajarkan dalam proses pendidikannya pada jenjang-jenjang yang telah ada dan diatur. Untuk itu, pada pendidikan sekolah sangat diperlukan adanya perencanaan dalam pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Perencanaan yang dimaksud adalah kurikulum pendidikan atau sekolah yang di dalamnya terdapat standar-standar pembelajaran dan pengembangan intelektualitas manusia.

Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervise sebagai suatu rangkaian dari kegiatan manajemen pendidikan³. Pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program itu. Oleh karena itu, supervise haruslah meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Istilah pengawasan ini didalamnya mengandung beberapa aktifitas, diantaranya adalah inspeksi, control dan evaluasi.⁴ Berdasar pada pengertian tersebut, maka sebenarnya ketika membahas tentang pengawasan, maka secara otomatis aktifitas control juga dilakukan. Oleh karena itu maka tulisan ini hanya memaparkan masalah pengawasan sebagai fungsi manajemen.

Dalam dunia pendidikan istilah "pengawasan" lebih cenderung dikonotasikan dengan kegiatan supervisi, yakni kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pengawas (supervisor) guna membantu seorang guru dalam memberikan arahan pada pelaksanaan kegiatan pendidikan, yakni dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tetapi sesungguhnya kedua istilah tersebut – meskipun dalam tataran praktik dianggap sama – ada perbedaan, walaupun pada akhirnya kedua istilah tersebut dipakai dalam kegiatan yang sama.

Istilah "pengawasan" dalam hal ini cenderung mengarah kepada salah satu peran seorang manajer dalam kegiatan manajemen, atau yang dikenal dengan istilah *controlling*. Oleh karena itu, istilah pengawasan dapat dipahami sebagai bagian kecil dari peran seorang manajer (bagian kecil dari fungsi kontrol). Artinya bahwa pengawasan merupakan *coercion* atau *compelling* yaitu suatu proses yang bersifat memaksa agar aktifitas dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan⁵.

Sebelum lebih jauh membahas tentang pengawasan, terlebih dahulu perlu dipaparkan tentang pengertian dari pengawasan itu sendiri. Hendyat Soetopo

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 154

⁴ Hendyat Soetopo, *Manajemen Pendidikan (Bahan Kuliah Manajemen Pendidikan)* Universitas Negeri Malang, 2001), hal. 75

⁵ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 102

mengartikan pengawasan sebagai suatu aktifitas dalam usaha mengendalikan, menilai dan mengembangkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Dengan pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.⁷ S. Hendayaningrat memberikan definisi pengawasan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁸

Ada juga yang mendefinisikan pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi.⁹ Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan.¹⁰

Berdasarkan paparan tersebut diatas tentunya dapat diambil pengertian bahwa pengawasan sebagai fungsi manajemen pendidikan bisa mengandung komponen; suatu aktifitas yang dilakukan dengan melihat-mengecek-menilai-mengoreksi-mencocokkan kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi, untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan..

Fungsi Pengawasan

Pengawasan ini mempunyai berbagai fungsi pokok, diantaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan; maksudnya bahwa pengawasan itu dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan serta penyelewengan. *Kedua*, memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi; artinya dengan adanya pengawasan hendaknya dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak terus berlarut-larut, yang akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi.

⁶*Ibid.*

⁷ Subardi, A., *Dasar - Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1992), hal. 6

⁸ Handayaningrat, S., *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hal. 143

⁹ Soewartojo, J., *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Restu Agung, 1995), hal. 132

¹⁰ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 17

Ketiga, mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para pekerja dalam melakukan tugas yang dibebarkannya. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, dapat pula di tempuuh suatu cara, yakni kalau memang tidak bisa dihindarkan adanya penyimpangan, maka kepada setiap pihak diwajibkan untuk membuat laporan secara tertulis mengenai penyimpangan tersebut. *Keempat*, mendinamisir organisasi serta segenap kegiatan menejemen lainnya ; yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan sehingga setiap bagian organisasi selalu siap dan selalu berusaha jangan sampai terjadi kesalahan pada bagiannya atau dengan kata lain bahwa setiap bagian ada yang selalu dalam keadaan yang dinamis serta terarah dengan sisten manajemen yang mantap.¹¹

Tujuan Pengawasan

Pada dasarnya tujuan pengawasan secara tidak langsung dapat dicermati dari batasan pengertian pengawasan tersebut, yakni suatu upaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Namun secara rinci tentang tujuan dari kegiatan pengawasan dalam sebuah manajemen adalah agar: (1) pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, prosedur dan perintah yang telah ditetapkan; (2) hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan; (3) sarana yang ada dapat didayagunakan secara efektif dan efisien; dan (4) diketahui kelemahan dan kesulitan organisasi untuk dicari jalan perbaikannya.¹²

Berdasarkan maksud tujuan dari dilaksanakannya pengawasan tersebut diharapkan dapat mencapai target tentang adanya kepastian terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan, meminimalisir pemborosan bahan, tenaga, biaya dan pikiran sehingga dapat diketahui perkembangan dari tiap-tiap taraf dan langkah-langkah kegiatan serta dapat diketahui pula ada atau tidaknya perubahan dan perlu atau tidaknya perbaikan, penyesuaian rencana, bimbingan, pengarahan dan system yang diterapkan.

Begitupun, pengawasan dalam manajemen pendidikan mempunyai tujuan yang amat beragam, yang secara umum dalam dipaparkan beberapa hal berikut: (a) menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku);(b) menertibkan koordinasi kegiatan. Kalau pelaksana pengawasan banyak, jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang, sebaliknya ada objek yang tak pernah tersentuh pengawasan; (c) mencegah pemborosan dan penyimpangan, Karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua;(d) menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.Tujuan akhir suatu pekerjaan yang professional adalah terciptanya kepuasan masyarakat; (e) membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi.Jika barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat tidak saja percaya pada pemberi jasa, tapi juga pada institusi

¹¹Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 102

¹² Hendyat Soetopo, *Manajemen Pendidikan....*, hal. 76

yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan organisasi; (f) mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak; (g) memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru; (h) mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan; (i) mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan); dan (j) mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan dalam sebuah organisasi terhadap suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebenarnya adalah dalam rangka untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi tercapainya suatu tujuan. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan dalam suatu organisasi adalah bagaimana mengubah pola pikir yang bersifat otokratif dan korektif menjadi konstruktif dan kreatif.¹³ Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana para pekerja merasa aman dan merasa diterima sebagai subyek yang dapat berkembang sendiri.

Pengawasan merupakan suatu aktifitas yang memungkinkan adanya intervensi positif dalam memeriksa arah yang diambil dan mengevaluasi hasil atau penyimpangan dari perencanaan sebelumnya, oleh karena itu pengawasan harus bersifat komprehensif dan terbuka.¹⁴ Terhadap berbagai hasil kinerja yang dilakukan. Prinsip yang harus dipertimbangkan dalam memberikan pengawasan antara lain adalah:¹⁵ *pertama*, prinsip ilmiah, yakni kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan data obyektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses kegiatan, menggunakan alat perekam yang akurat untuk memperoleh data seperti angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya, setiap kegiatan pengawasan dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinyu. Prinsip *kedua*, prinsip demokratis, yakni pengawasan yang dilakukan berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan penuh kehangatan, menjunjung tinggi harga diri dan martabat dan bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tetapi berdasarkan rasa kesejawatan.

Prinsip *ketiga*, kerjasama. Prinsip ini bertujuan mengembangkan usaha bersama dengan memberi support, mendorong, menstimulasi sehingga merasa tumbuh bersama. Prinsip *keempat*, konstruktif dan kreatif, yakni pengawasan dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi kreatifitas dan menciptakan situasi kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.

Prinsip lain yang mendasari dari pelaksanaan pengawasan disamping sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:¹⁶ (1) prinsip organisasional, artinya pengawasan harus dilaksanakan dalam kerangka struktur organisasi yang

¹³ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar...*, hal. 20

¹⁴ Udian Saifudin Sa'ud, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal.228

¹⁵ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar...*, hal. 20

¹⁶ Hendyat Soetopo, *Manajemen Pendidikan...*, hal. 77

melingkupinya; (2) prinsip perbaikan, artinya pengawasan berusaha mengetahui kelemahan atau kekurangan dan kemudian dicarikan jalan pemecahannya; (3) prinsip komunikasi, artinya pengawasan dilakukan untuk membina system kerjasama antara atasan dan bawahan, membangun hubungan baik dalam proses pelaksanaan pengelolaan organisasi; (4) prinsip pencegahan, artinya bahwa pengawasan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengelola komponen-komponen organisasi; (5) prinsip pengendalian, artinya pengawasan dilakukan agar semua proses manajemen berada pada rel yang telah digariskan sebelumnya; (6) obyektifitas, yakni pengawasan dilakukan berdasarkan data nyata di lapangan tanpa menggunakan penilaian dan tafsiran subyektif dari pengawas; dan (7) prinsip kontinyuitas, artinya dilakukan secara terus menerus, baik selama berlangsungnya proses maupun setelah pelaksanaan kerja.

Fungsi Pengawasan

Fungsi utama dari pengawasan adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain adalah menilai dan memperbaiki factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Swearingen bahwa fungsi dari pengawasan adalah untuk; mengkoordinasikan semua usaha, melengkapi kepemimpinan, memperluas pengalaman pekerja, menstimuli usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaian yang terus menerus, menganalisis situasi, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan organisasi dan meningkatkan kemampuan kinerja.¹⁷

Proses Pengawasan

Proses pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimana tahap-tahap tersebut adalah merupakan rangkaian suatu proses yang dilakukan dalam pengawasan. Proses pengawasan menurut M. Manullang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu; menentukan alat pengukur (*standard*), mengadakan penilaian (*evaluasi*) dan mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).¹⁸

Secara rinci proses pengawasan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: *pertama*, penentuan standar. Penentuan standar dalam proses pengawasan secara tepat memang agak sulit, akan tetapi penentuan standard terkait waktu dengan perilaku pegawai harus dilakukan. Diantara standar yang harus ditetapkan dalam melakukan pengawasan adalah standard waktu, yakni berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk atau memberikan layanan jasa tertentu, standard produktifitas, yakni jumlah produk dan layanan jasa yang dihasilkan selama periode waktu tertentu, standard biaya, yakni berapa biaya yang dikeluarkan untuk semua barang dan jasa, standard kualitas, yakni tingkat kemampuan yang dikehendaki, standard tingkah laku, artinya tipe tingkah laku yang dikehendaki terhadap pegawai dalam suatu organisasi. Lebih lanjut tentang

¹⁷ Swearingen, *Supervision of Instruction Foundation and Dimension*, (New York, British Manual of Sociology, 1961), hal. 21

¹⁸ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta, Galia Indonesia, 1990), hal. 69

penentuan standard ini Amirullah Haris Budiono mengacu kepada empat sumber informasi yang mencakup; pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan dan laporan tertulis.¹⁹

Kedua, evaluasi unjuk kerja. Evaluasi unjuk kerja ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penyimpangan berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini kemudian dibandingkan dengan standard yang ada, oleh karena itu evaluasi ini harus dilakukan dengan menggunakan ukuran yang akurat, dimana instrumentnya harus disusun secara lengkap dan valid. Mengadakan pengukuran ini harus terlebih dahulu dilakukan, karena tindakan perbaikan dapat dilakukan berdasarkan dari hasil evaluasi yang didahului oleh kegiatan pengukuran tersebut.

Ketiga, tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini dilakukan apabila, proses dan hasil kerja terdapat penyimpangan dari standard yang ditentukan, akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah sesuai dengan standard maka yang harus dilakukan adalah peningkatan. Tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan harus dibuatkan skala prioritas dalam penanganannya. Dalam melakukan perbaikan ada beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan, yaitu; tersedianya alokasi waktu yang memadai, rasionalisasi tambahan pegawai dan atau peralatan, alokasi waktu yang cukup bagi manajer untuk melakukan perbaikan manajemen dan adanya usaha extra dari semua komponen yang ada. Apabila usaha-usaha tersebut gagal dilaksanakan, maka perlu dilakukan penjadwalan ulang karena mungkin terdapat perubahan pada semua bidang.

Etika Pengawasan

Etika selalu berkaitan dengan standar baik-buruk. Hanya perlu diingat bahwa standar ini tidak berada di ruang hampa, selamanya berkonteks, mungkin sosial (politik, ekonomi atau kebudayaan) dengan lingkup lokal atau nasional, atau universal (kemanusiaan). Masalah dalam konteks ini manakala ada kekuasaan yang menentukan standar dan konteks baik buruk suatu perilaku. Misalnya, kekuasaan menetapkan standar baik-buruk hanya berkonteks politik dan lokal. Sementara pelaku ingin menggunakan konteks kebudayaan dan universal.

Pembicaraan tentang etika dapat pula melalui 2 jalan, yaitu pertama mempertanyakan keberadaan institusional, dan kedua dengan melihat keberadaan individual pelaku profesi. Jika yang pertama bersifat makro dengan pendekatan struktural, maka yang kedua bersifat mikro dengan memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perilaku seseorang.

Jalan lainnya dapat juga dilakukan dengan menitik-beratkan kepada bekerjanya nilai-nilai atas diri seseorang. Ada yang bersifat sosial, yaitu nilai-nilai yang diperoleh dari komunitas (sosialisasi) yang menjadi acuan dan komunitas memiliki daya pemaksa untuk dijalankannya nilai tersebut. Disini pelaku bersifat pasif. Selain itu ada pula nilai yang dipilih oleh individu secara sadar di antara sekian banyak nilai yang tereksposure kepadanya. Nilai ini dipilih dengan kesadaran, bahkan dengan sikap kefilosofatan tertentu. Maka pelaku dapat disebut

¹⁹ Amirullah Haris Budiono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal.304

bersifat aktif. Baik etika bersifat makro maupun mikro, ataupun nilai bersifat pasif maupun aktif, kesemuanya saling berkaitan, yang satu akan menentukan lainnya.

Etika makro dapat dikenali dengan melakukan analisis atas keberadaan institusi dalam interaksinya dengan institusi-institusi lainnya sebagai bagian sistem sosial. Peran sosial dari suatu institusi bagi yang menggunakan cara pandang struktural fungsionalisme adalah bertolak dari harapan/ekspektasi (expectation) institusi lain yang berada dalam system sosial. Keseimbangan terjadi manakala setiap pihak menjalankan peran yang berkesesuaian dengan ekspektasi pihak lainnya. Pandangan mekanistik atas sistem sosial ini mengabaikan pilihan-pilihan idealisme dari pelaku dalam institusi sosial. Jika sistem sosial sepenuhnya mesin yang dapat direkayasa tentulah keseimbangan dapat tercapai. Tetapi kenyataannya peran sosial adalah resultante dari peran yang ditetapkan bagi dirinya sendiri oleh pengelola institusi dengan peran yang menjadi ekspektasi institusi-institusi lainnya.

Berdasarkan paparan tersebut tentunya seorang pengawas dalam suatu manajemen harus bertindak secara professional dan selalu mendasarkan diri pada etika keilmuan yang dimiliki, menjaga kedudukan, martabat dan jabatannya di mata orang lain. Karena etika adalah pandangan, keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah dan merupakan standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika.²⁰

Pengawasan harus dilakukan berdasarkan nilai personal sebagai standar etika yang terdiri dari ; Nilai (*Values*) sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berfikir dan perilaku dari seseorang, Nilai Personal atau *Personal Values* pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorangsehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya dan Nilai Personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berfikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berfikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan.²¹

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hendyat Soetopo bahwa dalam menjalankan tugasnya pengawas handaklah berpedoman etik jabatan bahwa pengawas adalah; manusia Pancasila, pendidik, memiliki pengetahuan dan wawasan yang mutakhir, membantu melaksanakan program pendidikan, memahami dan menguasai masalah-masalah kependidikan, mampu memecahkan masalah demi kesuksesan organisasinya, mampu bekerjasama dan bergaul dengan berbagai pihak, menguasai teknik riset operasional, berusaha memelihara nama baik pengawas.²²

Berdasarkan dari paparan dan uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengawasan, seorang pengawas harus benar-benar

²⁰ M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.79

²¹ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hal. 201

²² Hendyat Soetopo, *Manajemen ...*, hal. 83

memiliki kematangan pribadi dan kematangan wawasan terhadap pekerjaan yang diawasi yang berhubungan dengan bidang personal, material, dan operasional dalam organisasi agar mampu mengendalikan organisasi untuk berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

Karakteristik Pengawasan

Sistem pengawasan yang efektif menurut Amirullah mempunyai karakteristik; akurat terhadap informasi, ekonomis, tepat waktu ketika diketahui penyimpangan, Sesuai dengan realitas oeganisasi, berpusat pada pengendalian strategic, Terkoordinasi dengan arus kerja, Obuektif dan komprehensif, fleksibel dan dapat diterima oleh para anggota.²³

Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang tepat sesuai dengan proses yang harus dilalui, tanpa menyimpang dari system yang dianut sehingga tahapan yang dilaluinya benar. Pengawasan sebagai suatu system, sebagaimana halnya system-sistem yang lain mempunyai karakteristik tertentu, namun demikian karakteristik tersebut tidak bersifat mutlak tetapi bersifat nisbi, artinya pada kondisi yang berbeda karakteristik itu menjadi berbeda pula.

Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa diantara beberapa fungsi manajemen, pengawasan mempunyai peran yang penting. Dalam fungsi, manajer melakukan evaluasi apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dan kalau tidak dapat dicapai, maka harus dicari faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga tindakan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai bentuk introspeksi diri bagi seseorang.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses manajemen tidak akan ada artinya, kalau tidak segera diikuti dengan tindakan pengawasan sebagai pengendalian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa; apabila kegiatan pengawasan sebagai bentuk pengendalian dilakukan secara efektif akan menjadikan jaminan bahwa tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi akan dapat tercapai.

²³ Amirullah Haris Budiono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal.307-309

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, Amirullah Haris. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996
- Handayani, S., *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1994.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, 2007.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Galia Indonesia, 1990.
- Nasution, M. Nur. *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Sa'ud, Udan Saifudin. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Sahertian, Piet A. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Soetopo, Hendyat. *Manajemen Pendidikan (Bahan Kuliah Manajemen Pendidikan)* Universitas Negeri Malang, 2001.
- Soewartojo, J., *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, Restu Agung, Jakarta. 1995.
- Subardi, A., *Dasar - Dasar Manajemen*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta. 1992.
- Swearingen, *Supervision of Instruction Foundation and Dimension*, New York, British Manual of Sociology, 1961.